

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal abad ke-20 di Indonesia menjadi sebuah era terbentuknya kesadaran bersama untuk berbangsa, bernegara dan bersatu ke dalam suatu ikatan yang disebut *nation*. Pemikiran tersebut dituangkan ke dalam wadah-wadah organisasi, sehingga pada awal abad ke-20 bermunculan organisasi-organisasi yang ingin meningkatkan martabat rakyat Indonesia. Pada masa pergerakan nasional muncul ide-ide baru mengenai membentuk organisasi yang modern, serta dikenal pula ide mengenai kepemimpinan. Inti dari ide ini adalah suatu bentuk kepemimpinan baru yang murni dikelola oleh rakyat Indonesia tanpa ada turut campur dari pihak kolonial Belanda (Ricklefs, 2010: 353).

Budi Utomo muncul pada tahun 1908 sebagai inspirasi terbentuknya organisasi modern di Indonesia, walaupun organisasi ini menetapkan wilayah perhatiannya hanya di Pulau Jawa dan Madura serta merupakan organisasi dari kalangan menengah, tetapi kesadaran untuk bersama ini dinilai memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan organisasi di Indonesia. Organisasi yang berkembang dipandang sebagai wadah untuk memupuk kesadaran politik, berpartisipasi dalam aksi kolektif dan menghayati identitas golongan (Kartodirdjo, 2014: 122). Tambahan pula dengan munculnya gagasan mengenai feminisme sebagai suatu gerakan politik di negara Barat, berkembang juga di Indonesia (Sadli, 1995: 14). Pengaruh yang ditularkan oleh Budi Utomo tidak hanya menjalar di kalangan laki-laki saja, tetapi juga perempuan mulai membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan haknya. Contohnya, organisasi Puteri Mardika yang didirikan oleh Budi Utomo di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini ikut memberikan bantuan berupa bimbingan dan penerangan kepada para gadis untuk menuntut pelajaran bagi kaum perempuan.

Organisasi perempuan yang terbentuk pada masa pergerakan nasional secara khusus menuntut haknya pada masalah perkawinan, keluarga dan pendidikan. Organisasi

Puteri Mardika memunculkan semangat untuk memperjuangkan hak perempuan, hal ini berdampak pada munculnya organisasi perempuan lain seperti Perkumpulan Kartini *Fonds* (1912), Kautamaan Istri (1913), Kerajinan Amai Setia (1914), Pawiyatan Wanito (1915), Wanito Hadi (1915), Purborini (1917), Wanito Susilo (1918), Aisyiyah (1917) (Soebandio, 1978: 16).

Latar belakang dari organisasi perempuan yang bermunculan pada masa pergerakan sangat beragam, ada yang memiliki latar belakang agama seperti Islam, Kristen dan Katolik serta ada pula yang fokusnya pada politik, sosial, dan budaya. Walaupun latar belakang organisasi-organisasi perempuan tersebut berbeda, tetapi keseluruhan organisasi perempuan pada masa pergerakan ingin memperbaiki kedudukan perempuan dalam kehidupan berumah tangga dan perkawinan serta memberikan kecakapan sebagai ibu dan istri dengan jalan menambahkan lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan kecakapan berumah tangga (Pringgodigdo, 1986: 21). Organisasi perempuan yang dilatar belakangi oleh agama Islam memiliki keunikan, karena pertarungan wacana untuk memperebutkan hegemoni Islam, pada akhirnya melahirkan organisasi keagamaan di kalangan umat Islam dengan dasar pemikiran yang berbeda seperti munculnya organisasi Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Al-Irsyad (Arifin, 2009: 180). Organisasi-organisasi Islam tersebut membentuk organisasi perempuan di bawah naungannya, tetapi pembentukannya ini tidak semudah yang dibayangkan, sehingga sulit untuk mengangkat sebuah organisasi perempuan yang otonom. Hal ini dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran mengenai kedudukan wanita di masyarakat hanya sebagai istri dan ibu saja. Contohnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi perempuan untuk kaum ibu yang dinamakan Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat-NU).

Muslimat-NU menjadi salah satu contoh betapa sulit membentuk sebuah organisasi perempuan di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Jamhari (2003: 21) menjelaskan bahwa Muslimat sebagai bagian struktural dari NU, lahir dari kalangan pesantren, dan kader-kader Muslimat kebanyakan berasal dari putri kiai atau

santri-santri. Berawal dari perkumpulan santri tersebut mulai bangkit keinginan santri perempuan untuk berkumpul dalam sebuah organisasi di bawah naungan NU.

Muslimat-NU terbentuk melalui musyawarah yang ketat di lembaga Nahdlatul Ulama, hal ini ditandai dengan pro-kontra yang terjadi ketika pelaksanaan muktamar NU selama bertahun-tahun dari tahun 1938 sampai dengan 1946. Pada masa itu, perempuan tidak mudah untuk ikut duduk berdiskusi bersama seperti layaknya laki-laki, sehingga butuh delapan tahun bagi perempuan Nahdliyin untuk meyakinkan kaum laki-laki NU agar membuat wadah bagi perempuan NU khususnya kaum ibu. Pembentukan Muslimat-NU terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) Muslimat-NU sebagai jemaah, (2) Muslimat-NU sebagai bagian wanita NU, (3) Muslimat-NU sebagai badan otonom.

Proses historis berdirinya Muslimat-NU merupakan perkembangan lanjut dari keberadaan wanita di lingkungan Nahdlatul Ulama, sebagai jemaah *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Dikatakan sebagai jemaah karena kehadiran kaum ibu dalam forum-forum muktamar NU sejak tahun 1938 belum memiliki suara untuk memilih dan dipilih. Keberadaan Muslimat-NU ini hanya memiliki hak dalam keberadaannya di bawah naungan NU, tetapi dengan terus berjuang maka pada akhirnya ketika NU melaksanakan kongresnya yang ke-14 di Magelang tahun 1939, membuat laki-laki NU tergerak untuk setuju membuat perkumpulan perempuan (Zuhri dkk, 1979: 42).

Alasan mudahnya jemaah perempuan NU mendapatkan persetujuan dari jemaah laki-laki NU, tidak terlepas dari jasa Wakil PBNU dari Surabaya, yaitu K.H.A. Wahab Hasbullah yang memberikan kesimpulan dalam kongres tersebut untuk menyamakan gerak kaum perempuan dengan kaum laki-laki agar dapat menjalankan segala yang diwajibkan oleh agama Islam secara bersama-sama. Selain itu pada kongres NU ke-13, peran dari tokoh jemaah perempuan NU seperti Nyi R. Djuniasih dan Nyonya Sitti Syarah sangat penting, karena mereka adalah perwakilan dari jemaah perempuan NU yang diperbolehkan untuk berpidato dan mengutarakan hasil pemikirannya terhadap perlunya dibentuk perkumpulan yang beranggotakan

perempuan. Penjelasan dari Nyi R. Djuniasih dan Nyonya Sitti Syarah menitikberatkan pada azas dan tujuan Nahdlatul Ulama yang merupakan perkumpulan yang secara sengaja mendidik umat Islam ke arah agama yang seluas-luasnya (Zuhri, 1979: 42). Pada dasarnya, agama Islam tidak membedakan gender, bahwa sebenarnya tidak hanya laki-laki saja yang dapat di didik tentang keagamaan tetapi perempuan harus mendapatkan pendidikan yang selaras.

Kesulitan yang dihadapi oleh Muslimat-NU pada saat itu kebanyakan didasari oleh pemikiran-pemikiran yang tidak menginginkan perempuan ikut berdiskusi bersama. Agama menjadi suatu alasan penyebab adanya subordinasi perempuan dari laki-laki (Boerhan, 2004: 1). Pemikiran tersebut dinyatakan dengan adanya peraturan yang melarang perempuan duduk berembuk, bergaul, dan berunding bersama-sama seperti laki-laki, sedangkan dalam kehidupan organisasi tidak ada perbedaan yang membatasi ruang gerak suatu gender. Selain itu, Stuers (2008: 10-11) menjelaskan bahwa adat yang turun temurun membuat pola pemikiran masyarakat menjadi statis, padahal adat tersebut seharusnya dapat berubah dan menyesuaikan dengan situasi yang baru. Wiriaatmadja (1984: 47) juga menyampaikan bahwa dalam hal pendidikan untuk perempuan masih sulit untuk didapatkan, karena adanya keberatan-keberatan dari orang tuanya sendiri seperti pendidikan bagi anak perempuan tidak perlu, atau belum dapat melihat kegunaannya dan adanya pandangan bahwa bersama-sama dengan anak laki-laki dalam satu sekolah tidak baik. Permasalahan-permasalahan tersebut dialami oleh Muslimat-NU yang mengalami sulitnya membentuk organisasi perempuan.

Organisasi Muslimat-NU dibentuk menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang berhaluan sosial keagamaan dengan visi terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Selain itu, Muslimat-NU bergerak aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat di bidang peribadatan, dakwah dan penerangan, sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup, pendidikan, hukum dan advokasi serta usaha kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan

tujuan organisasi (Pucuk Pimpinan Muslimat-NU, 2011: 3). Di awal pembentukannya, tokoh perempuan Muslimat-NU menyepakati adanya Peraturan Khusus Nahdlatul Ulama Muslimat (NUM) yang menginginkan perempuan Islam di Indonesia menjadi seorang ibu yang dapat menjalankan tugasnya di rumah dan bersedia memperkuat dan membantu tugas yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama Muslimat, 1946: 1). Hanya saja peraturan ini tidak disusun langsung oleh anggota NUM, tetapi disusun oleh Kiai H.M. Dahlan dan A. Azis Diyar dan disetujui oleh K.H.A. Wahab Hasbullah. Walaupun jemaah perempuan NU diperbolehkan untuk membentuk perkumpulannya tersendiri, tetapi dapat dilihat bahwa masih ada subordinasi perempuan dari laki-laki, karena kebebasan anggota perempuan untuk membentuk organisasi tersendiri masih dipegang oleh laki-laki.

Dalam perkembangannya, Muslimat-NU juga memiliki kewajiban untuk memperkuat dan membantu tugas yang ada di dalam NU. Hal ini dapat diartikan bahwa gerak langkah Muslimat-NU mengikuti gerak NU. Walaupun Muslimat-NU dibentuk menjadi organisasi yang berhaluan sosial-keagamaan tetapi selanjutnya Muslimat-NU ikut terjun ke dalam ranah perpolitikan di Indonesia ketika NU ikut terjun ke dunia politik. Terbentuknya Muslimat-NU yang otonom pada tahun 1952 merupakan awal bagi Muslimat-NU untuk ikut terjun dalam dunia politik praktis, hal ini bersamaan dengan keluarnya NU dari Masyumi dan membentuk partai tersendiri. Peran Muslimat-NU dalam dunia perpolitikan sangat besar pengaruhnya. Pada tahun 1952 setelah adanya keputusan untuk terjun dalam politik praktis, Muslimat-NU langsung mempelopori berdirinya Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (Ma'shum & Ali, 1996: 101).

Peranan pimpinan dalam kepengurusan organisasi Muslimat-NU dinilai sangat vital. Ada beberapa tokoh yang sangat menonjol dan ikut menggiring Muslimat-NU terjun ke dalam dunia perpolitikan, di antaranya adalah Nyonya Mahmudah Mawardi, Nyonya S.A Wahid Hasjim, Nyonya Asmah Sjachroni, Nyonya Chasanah Mansur, Nyonya Malihah Agus, Nyonya Aisyah Dahlan, Nyonya Hasbullah, Nyonya

Maryama Djunaidi, Nyonya Ali Masjhar, Nyonya Latifah Hashim. Selain karena keterlibatan mereka di dalam kancah politik, mereka merupakan tokoh-tokoh senior yang sangat aktif mengutarakan pendapatnya agar perempuan dapat ikut masuk ke dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Tercatat dalam sejarah kepemimpinan organisasi Muslimat-NU bahwa terdapat seorang tokoh perempuan NU yang sangat luar biasa dapat membesarkan nama Muslimat-NU, yaitu Nyonya Mahmudah Mawardi. Tokoh ini memberikan kontribusi yang sangat besar di masa kepemimpinannya, ia memimpin Muslimat-NU sebanyak delapan periode berturut-turut, hal ini membuktikan bahwa Mahmudah Mawardi memberikan pengaruh yang besar terhadap organisasi Muslimat-NU terhitung dari tahun 1950-1979 (NU, 2014). Muslimat di bawah kepemimpinan dari Nyonya Mahmudah Mawardi muncul menjadi organisasi yang progresif, dengan turut aktif dalam kepengurusan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan beliau ikut mendirikan Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) (Zuhri, 1979: 64-65). Mahmudah Mawardi terkenal dikalangan Muslimat-NU sebagai seorang pendidik dan politikus yang handal. Ia terjun ke dunia politik sejak tahun 1946 dengan diangkatnya menjadi anggota BP KNIP mewakili Masyumi (Ma'shum, 1996: 117). Karena latar belakang pendidikan dan pengalaman di dunia politik yang ia miliki, maka Muslimat-NU menjadi organisasi sosial keagamaan yang tidak luput dari dunia politik. Ketika NU menjadi sebuah partai politik, Muslimat-NU menjadi salah satu organisasi yang dipandang mumpuni di dalam dunia politik, hal ini dikarenakan kontribusi yang telah diberikan oleh Nyonya Mahmudah Mawardi terhadap Muslimat-NU. Walaupun kenyataannya pada awal masa kemerdekaan, posisi perempuan di dunia politik masih dinomorduakan.

Keberadaan perempuan yang diperbolehkan dalam dunia politik masih dipandang sebelah mata, karena pengambilan keputusan politik berada di tangan laki-laki. Hal ini terlihat dengan minimnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, juga adanya hambatan kultural bahwa kedudukan perempuan di mata masyarakat berada

pada posisi yang kurang mendukung gerakan emansipasi perempuan (Ma'shum & Ali, 1996: 71-72). Tahun 1950, permasalahan mengenai wanita masih belum mendapatkan penyelesaian yang baik, banyak keputusan yang kadang-kadang merugikan kaum perempuan (Zuhri, 1979: 64). Kasus-kasus yang berkembang, yaitu masalah perkawinan di bawah umur, poligami, masalah mengenai kurangnya penjelasan hak-hak perempuan di pengadilan agama, serta masalah mengenai keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Masuknya Muslimat-NU dalam dunia politik diikuti pula dengan pro-kontra. Kecenderungan Muslimat-NU yang condong kepada PPP yang merupakan partai yang dirintis oleh NU, membuat posisi Muslimat-NU dirugikan. Selain karena menimbulkan gangguan dalam upaya melaksanakan programnya, faktor eksternal seperti adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1969 tentang perlu adanya monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dan dipertegas dengan kebijaksanaan tentang pelarangan pegawai negeri ikut dalam salah satu organisasi tanpa seijin atasannya (Poesponegoro, 1993: 518). Disisi lain tujuan utama masuknya Muslimat-NU ke dalam dunia politik, yaitu untuk membantu mengangkat martabat perempuan tetapi karena diberlakukannya peraturan tersebut maka terjadi kevakuman kepemimpinan dalam organisasi Muslimat-NU di berbagai daerah. Tahun 1984 menjadi sebuah momentum penting bagi NU karena NU mengambil keputusan untuk kembali ke Khittah tahun 1926, yang turut menjadikan Muslimat-NU kembali ke poros awal menjadi organisasi yang berhaluan sosial-keagamaan. Maka kembali ke Khittah 1926 ini menjadi sangat relevan dan perlu bagi Muslimat-NU, karena Khittah ini bukan saja mengembalikan gerak langkah Muslimat-NU menjadi organisasi sosial-keagamaan tetapi juga kembali ke Khittah 1926 menjadi sebuah momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia NU (Ma'Shum & Ali, 1996: 91).

Permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai peranan organisasi Muslimat-NU di Indonesia. Selain itu, berkembangnya kajian mengenai perempuan menjadikan peneliti ingin mengkaji mengenai perempuan khususnya Muslimat-NU. Adam (2007: 7) mengemukakan bahwa sejarah Indonesia kebanyakan ditulis oleh laki-laki dan dalam perspektif laki-laki. Pemikiran-pemikiran yang mendasari timbulnya kajian mengenai perempuan itu menunjuk pada kebutuhan untuk memberikan legitimasi kepada pengalaman perempuan untuk dijadikan sumber berharga agar ditekuni secara ilmiah (Ihromi, 1995: x). Akhirnya, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai perempuan dengan perspektif perempuan. Serta dengan mengangkat masalah ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu sejarah mengenai perempuan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mengajukan sebuah judul, yaitu **“Perkembangan Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama Di Indonesia Pada Tahun 1952-1984”**. Tahun 1952 diambil oleh penulis karena pada tahun tersebut Muslimat-NU berdiri sebagai badan otonom dari NU dan tahun 1984 diambil oleh penulis karena terjadi peristiwa NU kembali ke Khittah tahun 1926, dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap reorganisasi Muslimat-NU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan utama yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah **“Bagaimana dinamika Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1952-1984”**. Sementara itu agar permasalahan yang dikaji lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi pokok permasalahan dengan merumuskan pokok permasalahan tersebut ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Muslimat Nahdlatul Ulama ?
2. Bagaimana upaya organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam menjalankan visi-misinya di Indonesia?

3. Bagaimana reorganisasi Muslimat Nahdlatul Ulama setelah adanya kebijakan kembali ke khittah tahun 1926?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana dinamika Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1952-1984, serta dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang telah diajukan ke dalam batasan masalah diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya Muslimat Nahdlatul Ulama, hal ini penting dikaji karena organisasi ini memiliki latar belakang sejarah pembentukan yang rumit. Seperti yang peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa pembentukan Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai badan otonom terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) Muslimat-NU sebagai jemaah, (2) Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai bagian wanita NU, (3) Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai badan otonom.
2. Menjelaskan upaya organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam menjalankan visi-misinya di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji karena suatu organisasi pasti memiliki visi-misi dan selalu melaksanakan suatu program kerja untuk dijalankan, agar organisasi tersebut dapat berkembang baik dalam ranah internal maupun eksternal. Selain itu, bagian ini menjelaskan kontribusi Mahmudah Mawardi selaku ketua umum Muslimat-NU, hal tersebut penting dikaji dikarenakan ia adalah salah satu ketua umum yang memimpin Muslimat-NU selama delapan periode berturut-turut memimpin organisasi tersebut dan menjadi dewan penasehat Muslimat-NU hingga ia wafat.
3. Menganalisis reorganisasi Muslimat Nahdlatul Ulama setelah adanya kebijakan kembali ke khittah tahun 1926. Hal ini penting dikaji karena Nahdlatul Ulama mengambil keputusan untuk kembali ke khittah tahun 1926 ini memiliki arti yang sangat besar bagi organisasi ini, karena ketika NU mengambil kebijakan

tersebut maka artinya organisasi ini menarik diri dari dunia politik dan kembali menjadi organisasi masyarakat yang berhaluan sosial-keagamaan. Kebijakan ini tidak hanya berpengaruh besar bagi NU saja, tapi juga berpengaruh besar bagi Muslimat-NU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini menambah pengetahuan tentang bagaimana peranan perempuan dalam sejarah di Indonesia terutama dalam pergerakan berorganisasi. Penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan sejarah mengenai sejarah organisasi perempuan.
2. Bagi organisasi Muslimat-NU, penelitian ini akan mengkaji sejarah organisasi perempuan ini sehingga masyarakat akan mengetahui lebih lanjut eksistensi organisasi ini dalam meningkatkan harkat dan derajat perempuan di Indonesia, baik di bidang sosial-keagamaan dan politik.
3. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini bisa menjadi bahan ajar di sekolah dalam menanggapi pembelajaran yang berhubungan dengan sejarah pergerakan perempuan. Selain itu, skripsi ini bisa menjadi pengembangan materi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kelas XI dan XII jurusan IPS.

1.5 Metode Penelitian

Gottschalk (Notosusanto, 2006: 39) mengemukakan bahwa metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sehingga dalam mengkaji tema penelitian ini, penulis melakukan pengujian dan analisis sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan tema yang akan dibahas.

Secara sederhana, Sjamsuddin (2007: 17) mengemukakan bahwa dalam metode sejarah meliputi Heuristik, Kritik, dan Historiografi yang meliputi penafsiran, penjelasan dan penyajian. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. Heuristik, yaitu suatu tahapan untuk mencari, menemukan atau mengumpulkan fakta dan data yang relevan, baik primer maupun sekunder, lisan maupun tulisan yang dapat dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Sumber sejarah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber tertulis. Teknik penelitian yang diambil adalah studi literatur, teknik ini dipakai untuk mengumpulkan sumber-sumber atau tulisan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian, hal ini dilakukan dengan jalan meneliti dan mengkaji sumber-sumber berupa buku dan arsip-arsip dari organisasi tersebut. Selain itu, penulis mengkaji berbagai sumber tertulis seperti penelitian terdahulu yang berupa skripsi.
2. Kritik, pada tahapan ini penulis mencoba untuk menganalisis secara kritis data atau sumber-sumber yang telah diperoleh dengan cara menilai apakah sumber-sumber yang telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Kritik sumber yang dilakukan oleh penulis melalui dua tahapan, yaitu kritik eksternal atau kritik luar untuk mengetahui otentitas suatu sumber sejarah dan kritik internal atau kritik di dalam untuk mengetahui kredibilitas suatu sumber sejarah. Dalam kritik eksternal, penulis mencoba melihat siapa yang menulis buku tersebut, bagaimana biografi penulis buku, dan bagaimana kiprah penulis buku tersebut dalam bidang sejarah. Dalam kritik internal, penulis mencoba membandingkan isi dalam suatu buku dengan buku yang lainnya. Sehingga penulis bisa melihat fakta yang sebenarnya.
3. Historiografi adalah penulisan sejarah serta merupakan tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan itu berupa penafsiran, penjelasan dan penyajian. Interpretasi, merupakan tahapan untuk menafsirkan keterangan-keterangan sumber secara rasional dan logis. Penafsiran atau interpretasi merupakan pengertian yang luas mengenai bagaimana sejarawan membuat suatu pandangan hasil dari pengkritikan sumber-sumber yang telah ditemukan. Penjelasan dalam metode historis berarti

kausalitas yang digunakan untuk menyintensiskan fakta-fakta. Dalam penulisan sejarah tahapan terakhir merupakan penyajian, tahapan ini disampaikan kepada pembaca dengan berupa laporan hasil penelitian.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur Organisasi Skripsi ini disesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI tahun 2013. Sistematika yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah mengapa penulis memilih tema ini, rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan, tujuan penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, manfaat penelitian yang akan membahas apa saja manfaat yang timbul setelah menulis penelitian ini, metode penelitian yang akan membahas mengenai metode yang dipakai oleh penulis dan bagian terakhir adalah struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang laporan kajian pustaka yang digunakan. Penulis mencoba menjabarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul Perkembangan Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama Di Indonesia Pada Tahun 1952-1984.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah metode penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode historis.

Bab IV Perempuan Islam dalam Pergerakan Zaman: Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia Pada Tahun 1952-1984, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Muslimat-NU, upaya organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam menjalankan visi-misinya di Indonesia, reorganisasi Muslimat-NU setelah adanya kebijakan kembali ke khittah tahun 1926. Semua hal tersebut dikaji dengan menggunakan sumber literatur yang relevan.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dalam bab ini menjelaskan tentang paparan yang menjadi jawaban dari beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya serta bab ini memaparkan saran untuk dijadikan rekomendasi kepada pembaca.